

Perwujudan *Competitive Authoritarianism* di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017

ABDUL HAFIZH KARIM*

KARIM Consulting Indonesia

Grha Tirtadi, R-206 & 209, Jl. Pangeran Antasari No.18 A, Jakarta, 12150

Indonesia

M. HAMDAN BASYAR**

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P – LIPI)

Gedung Widya Graha LIPI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 10, Jakarta Selatan, 12710

Indonesia

Email: hafizhkarim24@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas *competitive authoritarian regime* di Turki pada kasus referendum 2017. Referendum 2017 merupakan inisiasi Erdoğan yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdoğan didukung oleh AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*; Partai Keadilan dan Pembangunan) dan MHP (*Milliyetçi Hareket Partisi*; Partai Gerakan Nasionalis) di Parlemen, sedangkan HDP (*Halkların Demokratik Partisi*; Partai Demokratik Rakyat) dan CHP (*Cumhuriyet Halk Partisi*; Partai Rakyat Republik) menolak karena poin-poin amendemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada 2016 oleh kelompok Gülen. Pada perencanaan dan prosesnya, ditemukan beberapa dinamika politik yang terjadi di Turki, yaitu tindak represi terhadap kelompok oposisi, ketimpangan sumber daya dan akses kampanye, serta adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses referendum. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim Erdoğan mengimplementasikan nilai-nilai *competitive authoritarian* pada kasus referendum 2017.

Kata kunci: *competitive authoritarianism*, Erdoğan, oposisi, referendum, Turki

ABSTRACT

This article discusses the case of Erdoğan's regime on the case of Turkish referendum 2017. The referendum was initiated by Erdoğan, who argued that presidential system will make the country stronger and more stable. The referendum was supported by AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*; Justice and Development Party) and MHP (*Milliyetçi Hareket Partisi*; Nationalist Movement Party) in the Parliament, but then opposed by HDP (*Halkların Demokratik Partisi*; Peoples' Democratic Party) and CHP (*Cumhuriyet Halk Partisi*; Republican People's Party) due to their concern of one-man rule in Turkey. The referendum was held in the state emergency situation since the failed coup attempt in 2016 by the Gülenists. In the preparation and process, there were repression towards

* Penulis adalah Asisten Peneliti di KARIM Consulting Indonesia.

** Penulis adalah Peneliti Utama di P2P LIPI.

the oppositions, uneven access to the resources and campaign, and some indications of an unfair election. Based on the findings, this thesis concluded that Erdoğan's regime had implemented and embodied the competitive authoritarian model, especially in the case of the 2017's referendum.

Keywords: competitive authoritarianism, Erdoğan, opposition, referendum, Turkey

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.185>

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Turki mengamendemen konstitusinya melalui referendum yang dilakukan pada 16 April. Referendum diinisiasi oleh rezim Erdoğan sebagai yang berkuasa dan berhasil dilakukan dengan kemenangan tipis sebesar 51,4%. Pada referendum 2017, terdapat 18 butir perubahan yang secara garis besar merupakan transformasi sistem pemerintahan di Turki dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Pada poin perubahan ke-7 diatur juga bahwa pada saat referendum disahkan maka presiden diperbolehkan menjadi bagian dari partai politik setelah sebelumnya presiden harus berada di luar partai. Hal itu menjadi keuntungan besar bagi Erdoğan sebagai presiden yang sedang menjabat karena pada pemilu berikutnya ia akan mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin pemerintahan dan juga pimpinan partai apabila memenangkan pemilihan presiden.

Erdoğan yang merupakan presiden Turki sejak 2014 menggalang dukungan (menyatakan *evet* atau mendukung) parlemen dari dua partai, yaitu *Adalet ve Kalkınma Partisi* (Partai Keadilan dan Pembangunan; AKP) dan *Milliyetçi Hareket Partisi* (Partai Gerakan Nasionalis; MHP) dengan alasan perubahan itu akan memperkuat ekonomi dan stabilitas politik di Turki. Pada sisi lain, ada dua partai parlemen yang menolak adanya referendum di Turki (menyatakan *hayır* atau menolak), yaitu *Cumhuriyet Halk Partisi* (Partai Rakyat Republik; CHP) dan *Halkların Demokratik Partisi* (Partai Demokratik Rakyat; HDP) karena alasan bahwa perubahan sistem pemerintahan akan mengarahkan Turki pada pemerintahan yang diktator (Quamar 2017, 1-2). Keberhasilan referendum tersebut juga memberi keuntungan sangat besar bagi Erdoğan secara pribadi karena ia dapat menjabat sebagai presiden hingga 2029 (Najib 2018, 204) melanjutkan kekuasaannya sejak menjabat sebagai

perdana menteri pada tahun 2003 hingga 2014. Tudingan oposisi ini sejalan dengan analisis banyak sarjana yang mengkhawatirkan Turki telah bergerak menuju kepemimpinan politik yang terpusat, mengulangi sejarah politik republik di bawah Mustafa Kemal.

Tulisan-tulisan yang menengarai ciri otoritarian Turki dewasa ini telah cukup banyak dan menawarkan analisis yang menjelaskan maupun mendeskripsikan latar belakang memburuknya kualitas demokrasi di negara itu dari berbagai perspektif. Yavuz (2018), misalnya, menawarkan konflik AKP dengan gerakan Gülen telah menyebabkan AKP dan Erdoğan kehilangan kontrol politik. Pandangan tersebut sedikit banyak sejalan dengan tawaran Bakiner (2017) dan Çağaptay (2017). Tezcur (2017) melihatnya dari sisi yang berbeda bahwa Erdoğan mampu mengonsolidasikan kekuasaannya karena daya tarik personalnya; argumen yang bertolak belakang dari pendapat Ziya Önis. Önis (2015) melihat kekuasaan yang semakin besar di tangan Erdoğan dan AKP lebih karena dukungan 'komunitas yang solid', merujuk pada pemilih Muslim konservatif, yang telah mendukung mereka dari pemilu ke pemilu.

Kebanyakan dari tulisan-tulisan itu melihat bahwa demokrasi dan otoriterisme merupakan dua hal yang bertolak belakang. Jika demokrasi berkurang kualitasnya maka suatu rezim akan dikategorikan menjadi otoriter. Tulisan ini melihat bahwa pandangan-pandangan semacam itu kurang memperhatikan kenyataan bahwa rezim saat ini mampu memonopoli kekuasaan melalui elemen demokrasi. Oleh karena itu, tawaran analisis Esen dan Gumuscu (2016) dalam artikelnya '*Rising Competitive Authoritarianism (CA) in Turkey*' menjadi menarik yang menempatkan aspek adanya kompetisi sebagai salah satu karakter pemerintahan yang otoriter sekalipun. Kesimpulan itu diambil dari studi kasus pemilu 2015 dengan analisis tiga variabel dasar dari teori CA yang diperkenalkan oleh Steven Levitsky dan Lucan A. Way, yaitu pelanggaran terhadap kebebasan sipil, pemilu yang tidak adil, dan ketimpangan dalam kontestasi politik. Pelanggaran sipil yang ditemukan saat itu adalah hadirnya ancaman terhadap media, pelarangan untuk berkumpul, dan represi terhadap oposisi yang mengkritik pemerintah. Sedangkan pemilu yang

tidak adil terwujud dari intimidasi terhadap pihak oposisi yang diterima oleh HDP. Di sisi lain, terdapat ketimpangan yang besar dalam proses pemilu 2015 dalam bentuk institusi pemerintah yang ikut berpolitik, akses media yang timpang, serta sumber daya yang dikuasai oleh rezim.

Pada artikel lainnya, Esen dan Gumuscu kembali mengungkapkan perkembangan *competitive authoritarianism* di Turki yang berfokus pada hubungan antara negara dan bisnis. Kehadiran *Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu* (TMSF) menjadi lembaga penting yang berperan untuk mengakuisisi bisnis yang sedang terpuruk. Dengan demikian, rezim Erdoğan dapat mengonsolidasikan kekuatan ekonomi mereka dan menjadikannya sebagai sumber daya yang besar untuk pemerintah (Esen dan Gumuscu 2017). Artinya, ada aspek ekonomi yang harus diperhatikan dalam menganalisis rezim CA. Adanya aspek ekonomi ini menandakan bahwa CA sebagai analisis masih belum solid dan kedua sarjana tersebut masih mencari semua aspek yang turut berperan dalam CA dan berlaku universal.

Pada perkembangannya, kondisi Turki yang digunakan oleh Esen dan Gumuscu untuk membangun CA telah berubah karena dinamika politik pada 2016 hingga menjelang referendum 2017. Pertama, terjadi sebuah kudeta gagal di Turki pada 15 Juli 2016. Setelah kejadian itu, Erdoğan menetapkan status darurat negara dan belum dicabut pada saat referendum terjadi. Status tersebut memberikan landasan bagi pemerintah untuk menahan orang selama 30 hari tanpa dakwaan yang jelas (Eissenstat 2017, 13). Kudeta tersebut juga membawa eskalasi pelanggaran kebebasan sipil di Turki karena pasal 15 Konstitusi Republik Turki mengatur bahwa:

“Pada saat perang, mobilisasi, darurat militer, atau status darurat negara, hak dasar dan kebebasan dapat ditangguhkan secara parsial maupun keseluruhan, atau tindakan lain yang dibutuhkan untuk mengatasi urgensi dalam situasi tersebut, selama tidak melanggar hukum internasional.”

Kondisi tersebut juga menghadirkan ketimpangan yang terjadi pada referendum 2017, yang merupakan kunci utama bagi Erdoğan untuk

mengkonstitusikan hegemoni kekuasaannya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya media yang ditutup oleh pemerintah sehingga pihak yang menolak referendum sulit dalam melaksanakan kampanye. Tulisan ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi di Turki dengan menggunakan analisis CA menjelang dan ketika referendum terjadi pada tahun 2017 untuk melihat apakah CA yang ditawarkan Esen dan Gumuscu merupakan sesuatu yang berulang untuk dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang berlaku ajek. Untuk keperluan itu tulisan ini melihat perkembangan apa saja yang terjadi dan bagaimana implementasi ataupun perwujudan nilai-nilai *competitive authoritarianism* di Turki pada studi kasus referendum 2017. Tulisan ini berargumen bahwa sedikit banyak CA merupakan kerangka analisis yang relatif ajek dan berulang untuk digunakan sebagai penjelas terbangunnya sebuah rezim otoriter dengan merekayasa salah satu aspek terpenting dalam demokrasi, yaitu kompetisi.

STUDI LITERATUR

Teori *competitive authoritarianism* (CA) diperkenalkan oleh Steven Levitsky dan Lucan A. Way untuk mengidentifikasi model rezim yang berkembang setelah Perang Dingin. Berbeda dengan pemerintahan yang secara total mempraktikkan otoritarianisme, rezim yang dimaksud oleh Levitsky dan Way tetap membuka ruang kompetisi kepada oposisi. Akan tetapi, rezim CA menyiasati ruang kompetisi tersebut dengan membuat ketimpangan antara penguasa dan oposisi sehingga rezim memiliki kesempatan lebih besar dan bahkan dapat memastikan keberlanjutan kekuasaannya dalam konteks kontestasi politik. Menurut Larry Diamond (2002, 26-28) *competitive authoritarian* adalah satu model rezim yang hadir saat terjadi stagnansi demokrasi maupun kemunduran nilai-nilai demokrasi dalam sebuah rezim.

Dalam perkembangan politik di negara gelombang demokratisasi ketiga (*third wave democratization*), mayoritas rezim yang bermunculan adalah model *hybrid regime*. Pada tahun 2001, menurut Diamond (2002) tidak ada negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang mengadopsi demokrasi liberal, kecuali Israel. Saat itu Turki di-

golongkan sebagai model rezim ambigu (*ambiguous regime*), Lebanon bersama Iran dan Yaman dalam model *competitive authoritarian*, sedangkan negara-negara teluk (Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Arab Saudi, Irak, dan Bahrain) dan beberapa negara Afrika Utara (Maroko, Tunisia, Aljazair, Mesir, dan Kuwait) masih mengadopsi sistem otoriter (Diamond 2002, 31).

Kehadiran CA dalam diskursus demokratisasi membawa satu instrumen penting, yaitu ketimpangan yang diciptakan rezim terhadap oposisi. Hal tersebut merupakan variabel yang disintesiskan oleh Levitsky dan Way, setelah pengertian demokrasi prosedural yang dikemukakan oleh Dahl mengenai pemilu secara reguler, hak pilih tanpa pengecualian, dan perlindungan kebebasan sipil dinilai tidak cukup untuk melihat perkembangan rezim-rezim yang ada. Oleh karena itu, Levitsky dan Way menentukan bahwa ada tiga variabel penting untuk menentukan apakah sebuah rezim masuk dalam model CA, yaitu; (1) pemilu yang tidak adil, (2) pelanggaran kebebasan sipil, dan (3) ketimpangan dalam persaingan politik (Levitsky & Way 2002). Dalam konteks Turki saat ini, terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya. Hal itu diwujudkan dengan kontrol ketat pada media, penahanan tokoh-tokoh oposisi, dan lainnya. Way dan Levitsky juga menekankan bahwa kemenangan pada model *competitive authoritarian* bukanlah kemenangan besar, namun kemenangan dengan selisih yang tidak begitu signifikan.

Selain itu, ada juga ketimpangan dalam bidang persaingan politik yang diwujudkan dengan superioritas petahana dalam mengontrol segala jenis sumber daya yang ada. Rezim penguasa dapat memakai institusi negara untuk kepentingan partisan. Selain itu, kepentingan petahana dibantu dengan mengorbankan oposisi. Kemampuan oposisi untuk mengorganisasi dan bersaing dengan rezim juga dicerai. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan membatasi akses pada sumber daya, akses kepada media, dan penegakan hukum yang tidak sama antara rezim penguasa dan oposisi. Maka bila melihat kondisi Turki hingga saat ini, pemerintahan Erdoğan secara aktif menguasai sumber daya yang ada dan meminimalisasi kelompok oposisi. Oleh karena itu, teori

competitive authoritarian regime bisa digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi sebuah rezim penguasa, dalam hal ini yang akan dibahas adalah rezim Erdoğan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini mencoba menganalisis dan menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk dari represi dan dinamika politik sebagai perwujudan *competitive authoritarianism* yang terjadi menjelang referendum 2017 di Turki. Pembuktian dan penggambaran tersebut diperjelas dengan penyajian data yang didapatkan dari hasil penelitian.

Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada perspektif pihak oposisi. Perspektif tersebut dibutuhkan untuk melihat lebih lanjut bagaimana represi yang mereka terima, dan juga bagaimana rezim menstimulasi posisi oposisi yang lemah untuk memenangkan kontestasi politik. Akan tetapi, artikel ini diperoleh dari hasil laporan maupun data-data yang dikumpulkan dari berbagai lembaga internasional maupun media lokal di Turki yang tidak menjadi target penutupan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka ataupun studi literatur sehingga data yang didapatkan merupakan data sekunder. Penelitian ini mencoba mengumpulkan artikel jurnal maupun buku yang bersangkutan dengan topik referendum 2017 di Turki dan kondisi politik di Turki dari berbagai perspektif tulisan yang ada. Data-data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat terlihat korelasi antara temuan yang ada dan juga konfigurasi dari teori *competitive authoritarian*. Tentunya data yang dikumpulkan dan disajikan merupakan data setelah pemilu Turki 2015 sehingga dapat menggambarkan perbedaan kondisi antara studi kasus referendum 2017 pada penelitian ini dan juga studi kasus pemilu 2015 yang sebelumnya telah ditulis oleh Esen dan Gumuscu.

IMPLEMENTASI *COMPETITIVE AUTHORITARIANISM* PADA REFERENDUM TURKI TAHUN 2017

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, terdapat beberapa perkembangan politik yang terjadi di Turki pada peristiwa referendum Turki tahun 2017. *Pertama*, ditemukan bahwa represi terhadap media oposisi dalam bentuk penutupan maupun pengambilalihan secara masif terjadi sejak 2016. Dekrit yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki sejak kudeta gagal hingga Desember 2016, mengumumkan adanya penutupan terhadap 177 media dan 11 di antaranya kembali dibuka setelah adanya peninjauan ulang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 yang berada pada halaman berikutnya.

Kedua, terdapat pelanggaran kebebasan sipil yang terwujud dalam penangkapan tokoh-tokoh oposisi dan juga pendukung kelompok oposisi, dari partai politik maupun kelompok nonpartai politik. Bentuk represi tersebut merupakan salah satu komponen untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan rezim karena oposisi ditekan dari elit politiknya hingga ke akar rumput (*grassroots*) sehingga kekuatan oposisi sangat lemah. Apabila kita mengelompokkan oposisi menjadi oposisi partai politik dan nonpartai politik maka terlihat bahwa kedua kelompok sama-sama menjadi target dari represi yang dilakukan secara masif dalam kondisi darurat negara.

Ketiga, pada proses referendum terdapat ketimpangan yang diwujudkan dengan adanya intimidasi terhadap kelompok yang menolak referendum, akses media yang menguntungkan bagi rezim, dan ketimpangan sumber daya ekonomi yang ada. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya media independen di Turki setelah penutupan dilakukan oleh pemerintah. Pada sisi lain, penguasaan sektor bisnis yang dilakukan dengan cara akuisisi sepihak oleh pemerintah lewat lembaga Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) juga memperlemah sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bertentangan dengan rezim. Kondisi tersebut memperkecil ruang bagi kelompok penolak referendum untuk menggalang dukungan dari masyarakat luas.

Tabel 1
Daftar Media yang Ditutup*

Jenis Media	Nama Media
Agensi berita	Cihan Haber Agency, Muhabir Haber Agency, SEM Haber Agency. Dicle Haber Agency, Jin Haber Agency.
Saluran televisi	Bariş, Bugün, Can Erzincan, Dünya, Hira, Irmak, Kanal 124, Kanaltürk, MC, Mehtap, Merkur, Samanyolu Haber, Samanyolu, SRT Televizyonu,** Tuna Shopping, Yumurcak, İMC, Hayatın Sesi, Azadi, Jiyan, Van, TV10, Denge, Zarok **, Birlik Medya, Özgür Gün, Van Genç, Mezopotamya.
Koran	Adana Haber Gazetesi, Adana Medya Gazetesi, Akdeniz Türk, Şuhut'un Sesi Gazetesi, Kurtuluş Gazetesi**, Lider Gazetesi**, Işçehisar Durum Gazetesi**, Türkeli Gazetesi, Antalya Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Nazar, Batman Gazetesi, Batman Postası Gazetesi, Batman Doğuş Gazetesi, Bingöl Olay Gazetesi**, İrade Gazetesi, İskenderun Olay Gazetesi, Ekonomi, Ege'de Son Söz gazetesi**, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya Gazetesi, Gediz Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Milas Feza Gazetesi, Türkiye'de Yeni Yıldız Gazetesi, Hakikat Gazetesi**, Urfa Haber Agency Gazetesi, Ajans 11 Gazetesi, Yeni Emek, Banaz Postası Gazetesi, Son Nokta Gazetesi, Merkur Haber Gazetesi, Millet Gazetesi, Bugün Gazetesi, Meydan Gazetesi, Özgür Düşünce Gazetesi, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman Gazetesi, Today's Zaman, Özgür Gündem Gazetesi, Azadiya Welat Gazetesi, Yüksekova Haber Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi, Cizre Postası Gazetesi, Idil Haber Gazetesi, Güney Expres Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatık Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi, Ekspres Gazetesi, Türkiye Manşet Gazetesi, Dağyeli Gazetesi, Akis Gazetesi, İpekyolu Gazetesi, Son Dakika Gazetesi, Yedigün Gazetesi.
Saluran radio	Aksaray Mavi Radyo, Aktüel Radyo, Berfin FM, Burç FM, Cihan Radyo, Dünya Radyo, Esra Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül FM, Jest FM, Kanaltürk Radyo, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şimşek, Samanyolu Haber Radyosu, Umud FM**, Yağmur FM**, Batman FM, YÖN Radyo**, Özgür Radyo, Radyo Ses, Radyo Dünya, Özgür Güneş Radyosu, Radyo Karacadağ, Radyo Rengin, Gün Radyo, Patnos FM, Doğu Radyo.
Majalah	Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik (PASİAD), Bisiklet Çocuk, Diyalog Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprığı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve, Tiroj Dergisi, Evrensel Kültür, Özgürlük Dünyası, Habereksen.
Penerbit	Altın Burç Yayınları, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define Yayınları, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca Yayınları, Gülyurdu Yayınları, GYV Yayınları, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim Yayınları, Işık Yayınları, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak Yayınları, Kaynak Yayınları, Kervan Yayınları, Kuşak Yayınları, Muştu Yayınları, Nil Yayınları, Rehber Yayınları, Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları, Sütun Yayınları, Şahdamar Yayınları, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk Yayınları, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım PAZ, Reklamcılık, Yeni Akademi Yayınları, Yitik Hazine Yayınları, Zambak Basım Yayın Eğitim Turizm.

Sumber: Akgül 2016.

*Daftar ini merupakan hasil dari 12 Dekrit yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak deklarasi status darurat negara.

**Media yang dibuka kembali oleh pemerintah berdasarkan keputusan komisi yang ditugaskan untuk meninjau ulang.

Dalam pembahasan ini, poin-poin yang ditemukan dalam hasil penelitian akan dielaborasi lebih lanjut. Poin-poin tersebut juga akan dikaitkan dengan teori *competitive authoritarian* yang dipakai dalam penelitian ini. Keterbaruan data yang relevan dengan kondisi saat refe-

referendum di tahun 2017 merupakan sebuah kunci dalam penelitian ini karena peristiwa referendum tersebut menjadi hal yang sangat penting dan mengubah politik di Turki melalui konstitusi negara. Dengan demikian, tulisan ini memperkaya analisis dari Esen dan Gumuscu pada tahun 2016 mengenai kemunculan *competitive authoritarianism* pada pemilu Turki tahun 2015. Analisis antara kondisi yang terjadi di Turki dengan konfigurasi yang ada pada teori akan lebih mudah tergambar.

PELANGGARAN KEBEBASAN SIPIL

Sejak 15 Juli 2016, pemerintah Turki telah mengeluarkan setidaknya 30 dekrit yang berisi mengenai perintah penutupan media, penangkapan tokoh politik, maupun masyarakat yang dinilai berafiliasi pada dua Hizmet dan PKK. Dekrit-dekrit tersebut berdampak pada penahanan 135.778 orang, penutupan 3.003 sekolah dan institusi pendidikan lainnya, serta penangkapan terhadap 319 jurnalis di Turki (Turkey Purge, 18 April 2018). Dalam data tersebut, ada beberapa tokoh politik yang mendapatkan dakwaan bahwa mereka berafiliasi dengan satu dari dua kelompok itu sehingga pada beberapa kasus ditemukan bahwa seorang anggota Parlemen pun dapat ditahan oleh pemerintah tanpa tuntutan yang jelas.

Sebuah kasus yang cukup mendapat perhatian publik di Turki adalah penangkapan lawan politik Erdoğan, yaitu Selahattin Demirtaş yang merupakan tokoh pro-Kurdi. Demirtaş adalah lawan politiknya sejak pemilihan presiden pada tahun 2014, ketika ia mendapatkan perolehan suara sebanyak 9,77%. Penangkapan tersebut terjadi pada bulan November 2016 karena Demirtaş diduga membantu dan mendanai gerakan separatis Kurdi, yaitu PKK. Ia kemudian dituntut dengan tuntutan berlapis dengan akumulasi hukuman sebanyak 143 tahun masa tahanan (Eissenstat 2017, 7). Penangkapan tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari serangkaian dinamika politik di Turki karena Demirtaş hadir sebagai tokoh yang cukup populer sehingga penangkapan tersebut merupakan sebuah strategi dari rezim untuk mengeliminasi lawan politiknya.

Partai pendukung Demirtaş, yaitu HDP kemudian juga menjadi target dari penahanan yang terjadi. Setelah status darurat negara dideklarasikan, HDP mengklaim setidaknya ada 944 petinggi partai yang ditahan oleh pemerintah. Selain itu, anggota dan simpatisan partai di 36 provinsi juga menjadi korban dari operasi penahanan yang dilakukan oleh pemerintah. HDP mengklaim bahwa total dari elit partai, simpatisan, pengurus partai di daerah berjumlah setidaknya 8.711 orang (klaim pada Januari 2017). Selain itu, HDP juga mengungkapkan bahwa ada setidaknya 50 walikota dari HDP yang ditangkap dan kemudian digantikan oleh birokrat yang berasal dari AKP (Özsoy 2017).

Kelompok Kurdi PKK juga menjadi kelompok oposisi yang menjadi target represi rezim Erdoğan. Berbeda dengan HDP yang berjuang secara formal di politik, kelompok militan Kurdi ini terlibat dalam kontak senjata langsung dengan otoritas Turki. Menurut *Institute for Security and Development Policy* (ISDP), terjadi penahanan terhadap sekitar 2.000 anggota PKK pada Agustus 2016. Pada sisi lain, setidaknya ada 2.360 dari kelompok PKK yang gugur dalam peperangan yang dilakukan antara PKK dan militer Turki dari Juli 2015 hingga November 2016. Meskipun demikian, ada juga korban jiwa dari militer Turki yang diklaim sebanyak 1.500 orang oleh PKK (ISDP 2016, 4-6). Secara umum angka korban yang gugur dalam perang memang tidak terlalu signifikan perbedaannya, namun pemerintah juga melakukan penahanan terhadap ribuan anggota kelompok PKK.

Adapun untuk kelompok Gülen, menurut data yang dihimpun oleh *Council of Europe* pada Desember 2016, kelompok ini menjadi yang paling banyak menerima represi dalam bentuk penahanan maupun penutupan institusi. Segala bentuk represi tersebut berkaitan dengan keterkaitan para warga dan institusi kepada kelompok Gülen yang dideklarasikan sebagai kelompok teroris dan menjadi dalang pada kudeta gagal pada tahun 2016. Sebanyak 2.745 hakim dan 5 anggota Mahkamah Agung Turki/*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu* (HSYK) dipecat oleh otoritas terkait, sedangkan 2.836 anggota militer termasuk dari perwira tinggi ditahan pada 16 Juli 2016. Setelah itu, penahanan berlanjut pada 18 Juli 2016, keika 7.543 orang ditahan karena diduga

berperan dalam kudeta gagal yang terdiri dari 100 polisi, 6.038 tentara, 755 hakim, dan 650 masyarakat sipil. Selain itu, di bidang pendidikan ada 15.200 staf Kementerian Pendidikan yang dipecat dan 21.000 guru yang mengajar di sekolah yang berafiliasi dengan Gülen yang ditarik izin mengajarnya. Jumlah tersebut terus meningkat hingga 9 Desember 2016, ketika tercatat bahwa:

1. lebih dari 125.000 pekerja dipecat;
2. 92.607 kasus hukum diproses, 39.378 di antaranya telah ditahan;
3. 3.673 hakim dan jaksa dipecat dan 2.700 lainnya diberikan sanksi;
4. sekitar 1.800 organisasi/ yayasan ditutup; dan
5. sekitar 2.100 sekolah, asrama, dan universitas ditutup (*Council of Europe* 2016, 2).

KETIMPANGAN PADA PROSES REFERENDUM

Pada referendum 2017, terjadi polarisasi antara pihak pendukung dan juga yang menolaknya. Seperti yang sudah digambarkan pada bagian sebelumnya, pihak yang mendukung adanya referendum adalah AKP dan MHP. Beberapa partai kecil dan organisasi juga mendukung referendum. Di sisi lain, CHP dan HDP sebagai partai oposisi berada pada kubu yang menolak referendum bersama kelompok Gülen dan Kurdi. Pada prosesnya, beberapa dinamika politik terjadi sehingga referendum 2017 dapat dimenangkan oleh pihak pendukung.

Beberapa institusi negara maupun privat dari negara lain menyoroti dinamika politik yang terjadi pada proses referendum di Turki. Ungkapan mengenai ketimpangan tersebut salah satunya diungkapkan oleh *Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR) yang mengatakan adanya *'unlevel playing field'* pada proses referendum 2017 di Turki. Temuan-temuan yang ada kemudian akan menggambarkan ketimpangan yang terjadi antara pihak pendukung dan penolak referendum. Secara umum ada beberapa hal yang menjadi sorotan besar, yaitu penutupan maupun pengambilalihan media dan sektor strategis oposisi, polarisasi yang terbentuk antar kubu, ketimpangan pada tahap kampanye, hingga penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan

pendukung referendum. Hal tersebut diperkuat dengan adanya intimidasi dalam bentuk penahanan kelompok penolak referendum karena dinilai menggelar acara tanpa izin maupun menghina presiden pada acara tersebut sehingga terjadi tindak represif oleh aparat terhadap masa penolak referendum (OSCE 2017, 13). Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi pihak proreferendum karena ruang yang tersedia bagi mereka membuka kesempatan besar menuju kemenangan.

Pada kegiatan kampanye, penutupan media yang dilakukan membuat oposisi kesulitan untuk berkampanye. Minimnya media yang dimiliki oleh oposisi mendorong kelompok oposisi untuk menggunakan media prorezim. Hal tersebut diungkapkan oleh HDP dan CHP yang melaporkan sulitnya akses media pada OSCE, salah satu lembaga yang mengawasi proses rederendum tersebut. Bahkan menurut pengawasan terhadap media (*media monitoring*) yang dilakukan selama masa kampanye, kelompok pendukung mendapatkan sebanyak 76% dan kelompok penolak hanya mendapat 23% pemberitaan di media privat maupun media milik negara (OSCE 2017, 15-18). Keterbatasan akses tersebut menjadi sebuah kerugian bagi pihak oposisi, sekaligus menguntungkan bagi pendukung yang bisa mendominasi paparan kampanye di media.

Selain pada sektor media konvensional, seperti televisi, radio, koran, dan majalah, salah satu kanal media yang dipakai untuk berkampanye adalah media sosial. Akan tetapi, semenjak status darurat negara otoritas Turki memperketat pengawasan terhadap internet dan media sosial di Turki. Ketatnya kontrol terhadap media sosial tertuang dalam Dekrit No. 670, 671, dan 680 yang melegalkan penyadapan terhadap aktivitas di media sosial, pemblokiran internet, dan investigasi siber tanpa adanya surat perintah pengadilan (Yesil, Sözeri, & Khazraee 2017, 13-15).

Ketimpangan di media tersebut sangat berarti bagi kontestasi politik di Turki. Hal tersebut dikarenakan media, terutama televisi dan media sosial saat ini menjadi dua kanal utama bagi masyarakat Turki untuk mendapatkan informasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reuters Institute, televisi mendominasi dengan 47% dan media sosial menempati urutan kedua dengan 39% konsumen dari total populasi Turki (Yanatma 2017, 9-14). Dengan demikian, adanya dominasi dari

media prorezim di televisi dapat merugikan pihak oposisi, sedangkan penutupan akses media sosial juga akan membatasi ruang gerak oposisi untuk memanfaatkan kanal media alternatif tersebut.

Di sisi lain, seperti yang telah diungkapkan oleh Esen dan Gumuscu pada artikelnya di tahun 2017, TMSF kembali berperan penting dalam proses referendum di Turki. Setelah status darurat negara, TMSF melalui dekrit yang dikeluarkan oleh pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengakuisisi lebih dari 965 institusi keuangan yang dibekukan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, menurut Wakil Perdana Menteri Nurettin Canikli, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki aset sebesar US\$ 11,3 miliar. Salah satu institusi keuangan yang diakuisisi secara penuh adalah Bank Asya yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok Fethullah Gülen (Hurriyet, 7 Juli 2017). Kebijakan tersebut kemudian diperburuk dengan konstruksi yang dibangun oleh pemerintah bahwa siapa pun yang menabung di Bank Asya sejak 2014 berarti memberikan bantuan finansial terhadap kelompok teroris dan harus diselidiki (Atar 2018).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Erdoğan pada 10 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa ia akan membersihkan kelompok Gülen dari dunia bisnis. Erdoğan saat itu mempertegas bahwa jaringan FETO atau *Fethullahçı Terör Örgütü* (istilah yang digunakan pemerintah untuk kelompok Gülen) di sektor bisnis akan dibersihkan sebagaimana yang terjadi di militer, birokrasi, dan peradilan. Pernyataan tersebut kemudian direalisasikan dengan menutup secara keseluruhan bisnis yang dimiliki oleh kelompok Gülen, mulai dari bisnis kecil hingga kelompok bisnis besar (ARC 2017, 131).

INDIKASI KECURANGAN PADA REFERENDUM 2017

Referendum Turki 2017 kemudian menimbulkan kegagalan pada proses pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Pada proses pendaftaran pemilih, tercatat ada 570.000 calon pemilih yang dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tiga alasan, yaitu masih terlibat dengan wajib militer, alasan kejiwaan, dan juga mereka yang dipenjara karena tuntutan kriminal tertentu (OSCE 2017, 22).

Selain itu, menurut data yang dimiliki oleh Uni Eropa, ada setidaknya 500.000 warga Kurdi di Turki yang tidak dapat memakai hak pilih mereka karena tidak memiliki alamat tempat tinggal yang pasti, sebab mereka terus berpindah untuk menghindari konflik yang terus terjadi di daerah tenggara Turki (McIntyre 2017). Hal tersebut diperburuk dengan hadirnya penetapan zona keamanan khusus di beberapa provinsi di bagian Tenggara menjelang referendum. Dengan adanya penetapan zona tersebut maka di dekat setiap tempat pemungutan suara akan ada pos polisi yang mengecek identitas warga sekitar dan mengidentifikasi apakah mereka berada dalam daftar orang yang harus ditahan (OSCE 2017, 22).

Pada hari pemungutan suara, ada beberapa utusan dari Uni Eropa yang turut hadir untuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara di beberapa provinsi di Turki. Salah satu utusan, Stefan Schennach melakukan observasi di daerah Diyarbakır dan Mardin (keduanya merupakan daerah dengan penduduk mayoritas dari etnis Kurdi). Hasil observasi Schennach terhadap kondisi di kedua provinsi tersebut sangat mengkhawatirkan. Di Provinsi Diyarbakır terjadi sebuah kasus pembunuhan yang menewaskan tiga orang karena alasan perbedaan pandangan politik. Hal tersebut diperburuk dengan tempat kejadian yang terletak di luar TPS (McIntyre 2017) sehingga kejadian tersebut dilihat oleh para calon pemilih dan mungkin akan memengaruhi psikologis mereka saat akan memilih.

Sedangkan pada proses penghitungan suara, ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan pada hari pemungutan suara mengenai suara sah. Jika sebelumnya diatur bahwa suara sah adalah surat suara yang telah distempel resmi oleh penyelenggara pemilu atau *Yüksek Seçim Kurulu* (YSK) maka pada hari itu surat suara yang tidak distempel resmi oleh YSK juga dianggap sah. Kebijakan tersebut disebarkan lewat pesan singkat melalui telepon seluler para petugas di tempat pemungutan suara. Perubahan kebijakan tersebut kemudian mengundang protes dari partai oposisi, ormas, dan organisasi lainnya. Bahkan ada petisi yang ditandatangani oleh 500.000 warga yang menuntut pembatalan hasil referendum (OSCE 2017, 22).

Pascapemungutan suara, kubu oposisi mengkritik kebijakan YSK. Osman Baydemir yang merupakan elit partai HDP mengatakan bahwa fungsi penyelenggara pada saat referendum tidak berjalan dengan baik, ia melihat bahwa komisi pemilihan saat itu bersifat memihak. Hal tersebut dikonstruksikan karena kebijakan yang berubah pada setengah jam sebelum pemungutan suara dimulai, dan juga temuan lainnya. HDP menemukan bahwa ada sebuah foto yang memperlihatkan bahwa ada beberapa tumpuk kertas pemilihan yang menolak referendum ditinggalkan pada sebuah gedung. Pada kasus lain, saksi dari HDP melaporkan adanya kejanggalan di sebuah TPS karena suara sah terhitung 400, padahal TPS tersebut hanya mengakomodasi 360 pemilih. Sangkaan terhadap kecurangan referendum juga diungkapkan oleh Andrej Hunko, seorang anggota Parlemen Jerman yang saat itu ikut mengawasi proses referendum bersama utusan dari Uni Eropa lainnya. Hunko menyatakan bahwa kejanggalan dalam referendum secara jelas ditemukan di daerah tenggara, mengingat adanya penangkapan terhadap calon pemilih dan intimidasi yang dilakukan oleh aparaturnegara (Kingsley 2017).

Adanya indikasi kecurangan tersebut juga hadir bersamaan dengan kemenangan 'evet' atau pendukung referendum 2017 yang sangat tipis, yaitu 51,4%. Hasil tersebut tentunya tidak sesuai apabila koalisi AKP dan MHP dihitung secara matematis karena pada pemilu November 2015 masing-masing memperoleh 49,5% suara dan 11,9% suara sehingga seharusnya kubu pendukung mendapatkan setidaknya 60% suara. Penurunan yang cukup signifikan tersebut menunjukkan adanya pergeseran sikap dari masyarakat setelah adanya dinamika politik selama November 2015-April 2017. Terlebih lagi berdasarkan peta dukungan yang ada, rezim kehilangan suara dari Istanbul dan Ankara yang sebelumnya merupakan lumbung suara AKP (Yeni Safak 2015). Kedua kota tersebut adalah daerah potensial karena jumlah penduduk yang banyak (pemilih di Istanbul: 10.529.030 dan Ankara: 3.860.847) dan juga merupakan ibukota ekonomi serta pemerintahan di Turki. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang menjadi lebih represif

pada periode 2015-2017 menghasilkan penurunan dukungan dari masyarakat di dua kota besar tersebut.

KESIMPULAN

Pada studi kasus referendum 2017, dapat ditemukan adanya nilai-nilai dari *competitive authoritarianism* yang diimplementasikan oleh rezim Erdoğan. Hal tersebut terlihat dari tiga hal, yaitu pelanggaran kebebasan sipil, ketimpangan dalam proses referendum, dan indikasi kecurangan dalam referendum 2017. Kelompok PKK, Hizmet dan HDP yang sama-sama menolak referendum menjadi target represi yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga kelompok tersebut juga menjadi hal yang membedakan antara pemilu 2015 dan referendum 2017 karena pada pemilu 2015 HDP dan kelompok Kurdi yang menjadi target represi rezim saat itu. Dinamika politik yang terjadi itu tidak dapat dilepaskan dari rancangan besar Erdoğan untuk mempertahankan kekuasaannya karena referendum 2017 merupakan peristiwa penting yang akan membuka kesempatan bagi dirinya untuk berkuasa sebagai kepala pemerintahan hingga 2029.

Perkembangan ataupun eskalasi dari praktik *competitive authoritarianism* yang terjadi juga diperkuat dengan status darurat negara yang diberlakukan setelah peristiwa kudeta gagal di tahun 2016. Sejak status tersebut diberlakukan, terjadi lonjakan yang signifikan dalam hal penangkapan kelompok oposisi maupun penutupan bisnis-bisnis yang dimiliki oleh oposisi. Terlebih lagi dekrit-dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Erdoğan ditujukan untuk melemahkan kelompok oposisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eskalasi dalam hal *competitive authoritarianism* terjadi pada perencanaan dan proses referendum di Turki pada tahun 2017.

SARAN

Berdasarkan dinamika politik di Turki menjelang dan pelaksanaan referendum maka penelitian lebih lanjut mengenai pemilu dan pemilihan presiden serentak di Turki patut untuk diteliti. Perkembangan politik di

Turki bergerak dengan cepat karena sesuai dengan keputusan referendum, pemilu dan pemilihan presiden akan dilakukan pada November 2019. Akan tetapi, Erdoğan sebagai presiden mengajukan pemilu lebih awal sehingga pemilu akan dilakukan pada Juni 2018. Di sisi lain, Erdoğan juga telah kembali menjabat sebagai ketua AKP setelah terpilih di kongres luar biasa yang dilakukan pada 21 Mei 2017 (sekitar satu bulan setelah referendum).

Dengan demikian, model *competitive authoritarian regime* akan menjadi kerangka analisis yang dapat dipergunakan dalam pemilu berikutnya mengingat pola yang berlanjut dari pemilu 2015 hingga saat ini. Keberlanjutan pola ini akan terlihat dari upaya rezim dalam merekayasa kompetisi dalam demokrasi. Artinya, keberlangsungan kekuasaan rezim akan terlihat dari rekayasa terhadap setiap kekuatan potensial yang dapat mengganggu rezim. Hanya saja, tulisan ini melihat bahwa upaya rezim semakin meningkat setelah kudeta karena terdapat alasan, yang dianggap sah oleh publik dan konstitusi, untuk menekan oposisi, baik partai politik maupun kelompok lain, seperti media, akademisi, dan kelompok-kelompok sipil lainnya, lebih keras. Lebih jauh, tingkatan upaya rezim dalam membuka atau menutup ruang kompetisi akan berbeda walau masih dalam kerangka demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akgül, Elif. 2016. "Balance Sheet of State of Emergency." *Bianet*. 7 Desember. <http://bianet.org/english/media/181486-balance-sheet-of-state-of-emergency> (5 Februari 2018).
- Asylum Research Consultancy (ARC). 2017. "Turkey Country Report-Update." 21 November. https://www.ecoi.net/en/file/local/1325304/1226_1486117831_5890c8d84.pdf (1 Februari 2018).
- Atar, Ersan. 2018. "Depositing money in Bank Asya on Gülen's order proof of FETÖ membership." *Daily Sabah*. 11 Februari. <https://www.dailysabah.com/investigations/2018/02/12/depositing-money-in-bank-asya-on-Gülens-order-proof-of-feto-membership-1518386092> (11 Februari 2018).

- Bakiner, Onur. 2017. "How did we get here? Turkey's slow shift to authoritarianism." dalam *Authoritarian Politics in Turkey: Elections, Resistance and the AKP*. London: IB Tauris, 21-46.
- Çağaptay, Soner. 2017. *The New Sultan, Erdoğan and the Crisis of Modern Turkey*. London dan New York: I.B. Tauris.
- Celep, Ödül. 2017. "Perspectives on Turkey's 2017 Presidential Referendum." Rubin Center for Research in International Affairs. 14 Juni. <http://www.rubincenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Celep-revised-YC-aul-PDF.pdf> (15 Januari 2018).
- Cetin, Muhammed. 2012. *Hizmet: Questions and Answers on the Gülen Movement*. New York: Blue Dome Press.
- Corke, Susan, Andrew Finkel, David J. Kramer, Carla Anne Robbins, dan Nate Schenkkan. 2014. "Democracy in Crisis: Corruption, Media, and Power in Turkey." Freedom House. 3 Februari. <https://freedomhouse.org/sites/default/files/Turkey%20Report%20-%20Feb%203%2C%202014.pdf> (29 Desember 2017).
- Diamond, Larry Jay. 2002. "Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes." Arizona State University. 12 Januari. <http://www.asu.edu/courses/pos350/diamond--Thinking%20about%20Hybrid%20Regimes.pdf> (27 April 2018).
- Esen, Berk dan Sebnem Gumuscu. 2016. "Rising competitive authoritarianism in Turkey." *Third World Quarterly* 37 (No. 9): 1581-1606.
- Esen, Berk dan Sebnem Gumuscu. 2018. "Building a Competitive Authoritarian Regime: State-Business Relations in the AKP's Turkey." *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 20 (No. 4): 349-372.
- Edelman, Eric et al. 2015. "Turkey Transformed: The Origins and Evolution of Authoritarianism and Islamization Under the AKP". The Bipartisan Policy Center. 29 Oktober. <https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2015/10/BPC-Turkey-Transformed.pdf> (5 Januari 2018).
- Eissenstat, Howard. 2017. "Erdoğan as Autocrat: A Very Turkish Tragedy." The Project on Middle East Democracy. 12 April. <http://po->

- med.org/wp-content/uploads/2017/04/erdogan_as_autocrat.pdf (1 Januari 2018).
- Grand National Assembly of Turkey. "Constitution of the Republic of Turkey". https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (27 Februari 2018).
- Hurriyet. 2017. "Turkey says assets of seized firms worth \$11.3 billion." 7 Juli. <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-says-assets-of-seized-firms-worth-113-billion-115250> (3 Maret 2018).
- Institute for Security and Development Policy (ISDP). 2016. "Turkey's Kurdish Conflict: 2015-Present." Desember. <http://isdp.eu/content/uploads/2016/12/2016-Turkeys-Kurdish-Conflict-2015-Present.pdf> (29 Januari 2018).
- Kingsley, Patrick. 2017. "Videos Fuel Charges of Fraud in Erdoğan's Win in Turkey Referendum." *The New York Times*. 18 April. <https://www.nytimes.com/2017/04/18/world/europe/turkey-referendum-is-haunted-by-allegations-of-voter-fraud.html> (17 Januari 2018).
- Levitsky, Steven dan Lucan A. Way. 2002. "Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism." https://scholar.harvard.edu/levitsky/files/SL_elections.pdf (20 Desember 2017).
- Matusiak, Marek. 2015. "The Great Leap: Turkey Under Erdoğan." OSW/Centre for Eastern Studies. 27 Mei. https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_51_ang_great_leap_net.pdf (1 Januari 2018).
- McIntyre, Niamh. 2017. "EU observer in Turkey condemns referendum as 'neither fair nor free'." *The Independent*. 17 April. <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/eu-observer-turkey-condemns-referendum-result-president-Erdogan-opposition-parties-demand-recount-a7686876.html>. (1 Maret 2018).
- Najib, Muhamad. 2017. "Dinamika Demokratisasi: Perbandingan Kasus Indonesia (1998-2016), Turki (2002-2016), dan Mesir (2011-2016)." Disertasi, Universitas Nasional.
- OSCE. 2017. "Republic of Turkey Constitutional Referendum 16 April 2017: OSCE/ODIHR Limited Referendum Observation Mission Final Report." 22 Juni. <https://www.osce.org/odihr/elections/turkey/324816?download=true> (1 Januari 2018).

- Öniş, Ziya. 2015. "Monopolising the centre: The AKP and the uncertain path of Turkish democracy." *The International Spectator* 50 (No. 2): 22-41.
- Özsoy, Hişyar. 2017. "Ongoing Detentions and Arrests against HDP." HDP, 2 Januari. <http://www.hdp.org.tr/en/statements/ongoing-detentions-and-arrests-against-hdp/9717> (19 Februari 2018).
- Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). 2016. "Post-monitoring dialogue with Turkey: The failed coup in Turkey of 15 July 2016: some facts and figures." <http://website-pace.net/documents/19887/2221584/AS-MON-INF-2016-14-EN.pdf/dd9e2a06-d8e0-4d-75-86aa-e38c14bfe12f> (23 Januari 2018).
- Quamar, Md Muddassir. 2017. "The Turkish Referendum, 2017". *Contemporary Review of the Middle East* 4 (3) : 319-327.
- Yanatma, Sevret. 2017. "Reuters Institute Digital News Report 2017: Turkey Supplementary Report". 7 November. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-11/Turkey%20Digital%20News%20Report.pdf> (1 Januari 2018).
- Yavuz, M. H. 2018. "A Framework for Understanding the Intra-Islamist Conflict Between the AK Party and the Gülen Movement." *Politics, Religion & Ideology* 19 (No. 1): 11-32.
- Yeni Safak. 2015. "November 2015 General Election Results." 6 April. <https://www.yenisafak.com/en/secim-2015-kasim/secim-sonuclari> (3 Maret 2018).
- Yesil, Bilge, Efe Kerem Sözeri, dan Emad Khazraee. 2017. "Turkey's Internet Policy After the Coup Attempt: The Emergence of a Distributed Network of Online Suppression and Surveillance." 28 Februari. Internet Policy Observatory. <http://repository.upenn.edu/internetpolicyobservatory/22> (22 Januari 2018).
- Žídek, Libor dan Chribik Michal. 2015. "Impact of Currency Redenomination on Inflation Case Study Turkey." *Asian Economic and Financial Review* 5 (No. 6): 908-914. [http://www.aessweb.com/pdf-files/AEFR-2015-5\(6\)-908-914.pdf](http://www.aessweb.com/pdf-files/AEFR-2015-5(6)-908-914.pdf) (5 Februari 2018).

